1. Data-data hak asasi manusia :
2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Setiap orang berhak atas hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
4. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan ditetapkan dengan Undang-Undang.
5. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
6. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
7. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran.

Dari data di atas hak asasi manusia hasil amandemen UUD 1945 adalah nomor ….

1. (1), (2) dan (3) d. (3), (4) dan (5)
2. (2), (4) dan (6) e. (4), (5) dan (6)
3. (2), (3) dan (4)
4. Perhatikan data-data di bawah ini :
5. Peristiwa Semanggi I dan II
6. Hak atas rasa aman
7. Pembunuhan aktifis buruh Marsinah
8. Hak mengembangkan diri
9. Kerusuhan Timor Leste pasca jajak pendapat
10. Hak atas kesejahteraan

Dari data di atas perbuatan yang dapat diadukan ke Komnas HAM sebagaimana diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 adala nomor ….

1. (1), (2) dan (3) d. (3), (4) dan (5)
2. (2), (3) dan (4) e. (4), (5) dan (6)
3. (2), (4) dan (6)
4. Kedudukan pembukaan UUD negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam tata kehidupan bangsa dan negara Indonesia tidak dapat digambarkan seperti berikut ….
5. kaidah pokok negara yang fundamental
6. tertib hukum tertinggi dalam negara
7. berkedudukan luhur, kuat dan tetap
8. menjabarkan pokok pikiran yang terkandung dalam Batang Tubuh
9. memiliki hubungan causal organis dengan pasal-pasal
10. Pokok pikiran ketiga Pembukaan UUD negara Republik Indonesia tahun 1945 sejalan dengan nilai Pancasila, yaitu sila ….
11. pertama d. kelima
12. kedua e. keempat
13. ketiga
14. “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia …. seterusnya”.

Kalimat tersebut merupakan penggalan dari ….

1. Pembukaan UUD RI Tahun 1945 alinea keempat
2. Pembukaan UUD RI Tahun 1945 alinea ketiga
3. Pembukaan UUD RI Tahun 1945 alinea kedua
4. Pembukaan UUD RI Tahun 1945 alinea pertama
5. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
6. Sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 hasil amandemen adalah sistem kabinet presidensial, namun masih mengambil unsur-unsur dari sistem parlementer, seperti ….
7. parlemen terdiri atas dua bagian (bicameal) yaitu DPR dan DPD
8. presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan
9. kabinet atau menteri diangkat oleh presiden
10. presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR
11. presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket
12. Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah berupa pemberian tugas dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintah pusat yang ada di daerah disebut ….
13. tugas pembantuan d. otonomi daerah
14. desentralisasi e. dekonsentrasi
15. modebewind
16. Hak dan kewenangan daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahan daerahnya sendiri disebut ….
17. dekonsentrasi d. daerah otonom
18. sentralisasi e. desentralisasi
19. otonomi daerah
20. Data-data tujuan dan fungsi hukum:
21. Melindungi masyarakat dari ancaman bahaya.
22. Mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada masyarakat
23. Digunakan untuk arah dan acuan, tujuan, serta pelaksanaan pembangunan
24. Menciptakan keadilan dan ketertiban
25. Menjaga dan memberikan keadilan bagi manusia

Dari data diatas yang termasuk fungsi-fungsi hukum adalah nomor ….

1. 1, 2, dan 3 d. 3, 4, dan 5
2. 1, 3, dan 5 e. 1, 4, dan 5
3. 2, 3, dan 4
4. Hukum material dan hukum formal merupakan penggolongan hukum berdasarkan ….
5. tugas dan fungsinya d. ruang berlakunya
6. bentuknya e. waktu berlakunya
7. isinya
8. Tata urutan peraturan perundang-undangan :
9. Undang-Undang / Perpu
10. Peraturan Presiden
11. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
12. Peraturan Pemerintah
13. Peraturan Daerah

Berdasarkan data di atas jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU Nomor 10 Tahun 2014 urutan yang benar sebagai berikut ….

1. 3, 1, 4, 2, dan 5 d. 3, 4, 5, 2, dan 1
2. 2, 3, 1, 5,dan 4 e. 4, 5, 3, 1, dan 2
3. 1, 2, 3, 4, dan 5
4. Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang telah berjasa kepada negara dan negara membutuhkan, melalui ….
5. adopsi
6. perkawinan
7. naturalisasi biasa
8. mendapat suaka politik dari pemerintah Indonesia
9. naturalisasi istimewa
10. Agus masuk dalam Dinas militer asing tanpa izin Menteri Hukum dan HAM. Akibat perbuatannya itu maka Agus akan mengalami ….
11. kewarganegaraan tetap d. kewarganegaraan tidak tetap
12. menjadi warga negara asing e. hilangnya kewarganegaraan
13. mempunyai kewarganegaraan rangkap
14. Hak mendapatkan upah, mendapatkan cuti, kewajiban membayar pajak, merupakan hak dan kewajiban warga negara di bidang ….
15. hukum dan pemerintahan d. sosial budaya
16. politik e. pertahanan keamanan
17. ekonomi
18. Ancaman dalam proses membangun integrasi bangsa berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi dua yaitu ancaman fisik dan ancaman ideologis.

Di bawah ini yang bukan termasuk ancaman fisik ialah ….

1. serangan senjata d. perusakan fasilitas
2. arus globalisasi e. konflik berdarah
3. terorisme
4. Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, dapat diwujudkan dengan cara ikut dalam siskamling, ini merupakan perwujudan nilai ….
5. cinta tanah air
6. kesadaran berbangsa dan bernegara
7. rela berkorban untuk bangsa dan negara
8. memiliki kemampuan bela negara
9. memahami, menghayati, mengamalkan Pancasila
10. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografisnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 merupakan pengertian ….
11. ketahanan nasional d. integrasi nasional
12. kewaspadaan nasional e. Bhinneka Tunggal Ika
13. wawasan nusantara
14. Penegakan HAM di Indonesia juga dilakukan oleh lembaga peradilan yang khusus menangani pelanggaran HAM adalah pengadilan HAM dan pengadilan Ad Hoc HAM. Pengadilan HAM dibentuk atas dasar ….
15. Undang-Undang RI No.5 Tahun 1998
16. Keputusan Presiden RI No.50 Tahun 1993
17. Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998
18. Undang-Undang RI No.39 Tahun 1999
19. Undang-Undang RI No.26 Tauhn 2000
20. Amin sebagai pejabat negara menggelapkan uang/barang milik negara/rakyat bertentangan dengan/ melanggar UU No.28 Tahun 1999 tentang ….
21. penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN
22. tindak pidana pencucian uang
23. komisi pemberantasan korupsi
24. pemberantasan tindak pidana korupsi
25. sistem manajemen sumber daya manusia KPK
26. Pernyataan yang menunjukkan perbedaan pengertian antara penduduk dengan bukan penduduk adalah ….
27. bahasa dan tempat tinggal sementara
28. tempat tinggal secara permanen dan domisili sementara
29. hak dan kewajibannya
30. agama dan ibadahnya
31. kedudukan dan jabatannya
32. Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak pada bulan Desember tahun 2015 yaitu menggunakan sistem pemilu ….
33. bertingkat d. proporsional
34. distrik e. stelsel daftar
35. langsung
36. Demokrasi dibedakan menjadi dua yaitu demokrasi formal dan demokrasi material. Pembagian tersebut berdasarkan ….
37. penyaluran kehendak rakyat
38. titik perhatiannya
39. prinsip ideologi
40. pertanggungjawaban para anggota parlemen
41. sistem pemilihan umum yang dianutnya
42. Pemilihan umum merupakan salahsatu perwujudan demokrasi Pancasila. Jika setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan untuk ikut pemilu, dia mempunyai hak pilih aktif maksudnya ….
43. ikut memilih karena pemilihan umum bersifat bebas
44. akan memilih wakil-wakil rakyat yang dapat dipercaya
45. tidak memilih karena tidak ada calon yang disenangi alias golput
46. menunggu hasil pemilihan siapa yang menang akan saya ikuti
47. menggunakan hak pilih sebagai warga negara yang bertanggung jawab
48. Sejak diadakannya perubahan UUD 1945, konstitusi kita meninggalkan doktrin pembagian kekuasaan secara vertikal dan mengadopsi gagasan pemisahan kekuasaan dalam arti horisontal, meliputi ….
49. Legislatif, Eksekutif, Eksaminatif
50. Legislatif, Eksekutif, Konsultatif, Federatif
51. Legislatif, Federatif, Eksaminatif, Oligarkhi
52. Legislatif, Eksekutif, Yudikatif, Federatif
53. Mobokrasi, Legislatif, Eksekutif, Yudikatif
54. BAGAN/GAMBAR LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD 1945 HASIL AMANDEMEN

BADAN-BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

KY

TNI/Polri

Kejaksaan agung

Kementrian

BPK

Presiden

DPR

MPR

DPD

MA

MK

UUD 1945

KPU

Dari bagan di atas lembaga yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang terkait dengan pemerintahan ialah ….

1. BPK d. MPR dan MA
2. DPD dan MPR e. DPR
3. MA dan MK
4. Pembagian kekuasaan secara vertikal dan secara horisontal. Pembagian kekuasaan secara vertikal meliputi ….
5. kesatuan dan serikat d. demokrasi dan oligarkhi
6. monarkhi dan republik e. pemerintah pusat dan pemerintah daerah
7. presidentiil dan parlemnter
8. Pengadilan yang disediakan warga negara yang melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan pertama dan banding adalah ….
9. Mahkamah Konstitusi d. Arbitrace
10. Mahkamah Agung e. Mahkamah Luar Biasa/Mahmilub
11. Mahkamah Internasional
12. Terselenggaranya peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan membutuhkan lembaga-lembaga dan profesi. Lembaga yang disebut penuntut umum ialah ….
13. Kepolisian d. Advokat
14. Kehakiman e. Panitera
15. Kejaksaan
16. Berikut ini yang bukan merupakan ancaman dalam proses integrasi nasional ialah ….
17. korupsi d. perang saudara
18. spionase e. agresi oleh negara lain
19. sabotase
20. Masyarakat sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya, tetapi perhatian masyarakat terhadap politik masih bersifat pasif karena ada otoriter pemerintah, merupakan ciri dari ….
21. budaya politik parokial d. sistem politik supra sepali
22. budaya politik partisipan e. budaya politik kaula
23. sistem politik metasepali
24. Clifford Geetz mengelompokkan masyarakat Indonesia atas beberapa sub budaya politik yaitu ….
25. aristrokasi Jawa dan wiraswastawan Islam
26. aristrokasi Jawa dan masyarakat Islam pantai
27. santri, petani pedalaman dan masyarakat gunung
28. santri, abangan dan priyayi
29. aristrokasi jawa, santri, abangan
30. Kunainah, TKI asal Brebes yang dianiaya majikan di Singapura terlantar saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Dia berangkat sebagai TKI legal melalui PT. Sumber Kencana Sejahtera yang mentelantarkan kepulangan Kunainah ke tanah air. Melanggar nilai praksis Pancasila sila ke ….
31. Ketuhanan Yang Maha Esa
32. Persatuan Indonesia
33. Kerakyakatan yang dipimpin oleh hikmad kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
34. Kemanusiaan yang adil dan beradab
35. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
36. Peristiwa-peristiwa yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM :
37. Pembunuhan massal 40.000 orang rakyat Sulawesi Selatan oleh Kapten Westerling tahun 1946.
38. Pembunuhan 431 penduduk Rawa Gede oleh tentara Belanda tahun 1947.
39. Peristiwa Talang Sari pada tahun 1989.
40. Penembakan mahasiswa Trisaksi 12 Mei 1998.

Dari data-data pelanggaran HAM di Indonesia dapat diketagorikan ….

1. crime againts hummanity d. the crime of genocide
2. war crimes e. kejahatan perang
3. the crime of aggression
4. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan oleh presiden, pemerintah “…………….” sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3) UUDNRI tahun 1945.
5. menjalankan APBN tahun yang lalu tahun terakhir
6. mengeluarkan PERPU tentang APBN
7. membubarkan DPR sebagaimana pernah dilakukan oleh Presiden Soekarno
8. menjalankan APBN tahun yang lalu
9. menetapkan APBN bersama-sama dengan DPD
10. Lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lainnya dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran ialah ….
11. Bank Syariah d. jasa keuangan
12. Bank konvensional e. Bank Sentral
13. Bursa Efek Indonesia
14. Lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yang hasil pemeriksaannya dilaporkan kepada DPR ialah ….
15. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) d. Mahkamah Konstitusi
16. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) e. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
17. Bank Indonesia
18. Sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum dengan pejabat negara baik pusat maupun di daerah diadili di lingkungan ….
19. peradilan agama d. peradilan umum
20. peradilan militer e. pengadilan negeri
21. peradilan tata usaha negara
22. Tujuan negara sebagaimana termuat dalam pembukaan UUDNRI tahun 1945 alinea ke-4, maka kita termasuk negara yang menganut ….
23. teori Welfare State d. teori negara polisi
24. teori negara kekuasaan e. teori Plato
25. teori teokratis
26. Suatu kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai dan cita-cita yang sama, tujuannya untuk memperoleh kekuasaan politik secara konstitusional, salah satu contoh infrastruktur politik ….
27. kelompok kepentingan d. media massa
28. kelompok penekan e. partai politik
29. organisasi kemasyarakatan
30. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Jo UU RI Nomor 8 Tahun 2005 Jo UU RI Nomor 12 Tahun 2008 yang mengatur urusan otonom pemeirntahan daerah. Di bawah ini yang bukan urusan otonom pemerintahan daerah *kecuali* ….
31. politik luar negeri d. agama, moneter
32. pertahanan dan keamanan e. pendidikan
33. yustisi/hukum
34. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan upaya pencegahan, juga menangani kasus yang mudah terjadi, salah satunya menjatuhkan vonis yang dilakukan oleh ….
35. Kepolisian d. TNI
36. Lembaga OMBUDSMAN e. Lembaga Peradilan
37. KPAI
38. Partisipasi warga negara/masyarakat dalam pencegahan pelanggaran hak dan kewajiban warga negaraialah ….
39. meningkatkan kedisiplinan
40. membantu aparat negara dengan cara ikut serta dalam siskamling
41. menghormati sesama manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya
42. meningkatkan rasa nasionalisme
43. mentaati peraturan-peraturan yang mengatur tentang HAM
44. Pentingnya hubungan internasional bagi negara Indonesia, maka pada tahun 1950 negara Indonesia masuk menjadi anggota PBB untuk ….
45. memudahkan pengakuan dari negara lain
46. memasyarakatkan kekayaan alam Indonesia
47. dapat mengikuti pertumbuhan dan perkembangan
48. ikut serta melaksanakan ketertiban dunia
49. memanfaatkan bantuan dari negara kaya
50. Salah satu perwujudan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif adalah penyelenggaraan “………….” yang melahirkan deklarasi Bandung ialah ….
51. salah satu pendiri gerakan Non-Blok
52. penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika
53. menghadiri konferensi Bangkok
54. salah satu pendiri ASEAN
55. menjadi anggota OPEC pada tahun 1970
56. Tahap-tahap proses pembuatan perjanjian internasional adalah ….
57. perundingan, penandatanganan dan pengesahan
58. persetujuan, penetapan dan ratifikasi
59. pertemuan, keputusan dan tanda tangan
60. penandatanganan, pengesahan, dan perundingan
61. pengesahan, perundingan dan penandatanganan
62. Sistem pertahanan dan keamanan negara bersifat semesta bercirikan aspek ….
63. kerakyatan, utuh, bulat
64. ideologi, politik, ekonomi
65. kesemestaan, wawasan nusantara, ketahanan nasional
66. kerakyatan, kesemestaan, kewilayahan
67. kewilayahan, trigatra, panca gatra
68. Untuk mengatasi ancaman yang berupa gerakan terorisme dengan jalan ….
69. melarang mendirikan organisasi politik maupun ORMAS
70. membentuk lembaga intelijen negara yang kuat
71. mensosialisasikan ajaran empat pilar kebangssaan ke seluruh lapisan masyarakat
72. memperkuat institusi TNI dan Polri
73. mengadakan operasi yustisi kependudukan
74. Data-data strategi dalam menghadapi ancaman berdimensi politik :
75. Penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang sah, efektif, berwibawa, bebas KKN
76. Politik dan diplomasi Indonesia diarahkan untuk selalu aktif dan berperan dalam membangun
77. Pembangunan dan penataan sistem politik dalam negeri yang sehat dan dinamis
78. Politik luar negeri dikembangkan untuk berperan dalam penguatan ASEAN

Dari data-data diatas langkah-langkah yang ditempuh yang termasuk pendekatan ke dalam ditunjukkan pada nomor ….

1. 1, 2, dan 3 d. 2, 4, dan 5
2. 2, 3, dan 4 e. 1, 3, dan 5
3. 3, 4, dan 5
4. Perhatikan data-data di bawah ini :
5. Ada dua macam pemerintahan, yaitu pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian.
6. Urusan yang diurus pemerintah negara federal hal-hal yang menyangkut hubungan luar negeri, mata uang, pos dan komunikasi peradilan

Dari data diatas merupakan ciri dari ….

1. bentuk negara kesatuan d. bentuk pemerintah Republik
2. bentuk negara serikat e. sistem pemerintahan parlementer
3. bentuk kenegaraan
4. Karakteristik negara kesatuan republik Indonesia diatur dalam Pasal 1 Ayat (1), Pasal 18 Ayat (1), Pasal 18B Ayat (2), Pasal 25A dan Pasal 37 Ayat (5) UUD Negera Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal yang menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara …. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Pasal 1 Ayat (1) d. Pasal 18 Ayat (1)
2. Pasal 25 e. Pasal 37 Ayat (5)
3. Pasal 18B Ayat (1)

\*\*\*